

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Stakeholder Theory*

Stakeholders teori memberikan pengetahuan teoritis dasar untuk pelaku *public relations* dalam mendalami cara individu, kelompok, serta organisasi luar yang berpengaruh pada kegiatan organisasi tempat bekerja. Cakupan *stakeholders* lebih besar dibandingkan publik, teori ini menerangkan proses sehari-hari membentuk hubungan yang dilaksanakan organisasi dengan para pelaku dilingkungan sekeliling operasional organisasi. *Stakeholders* teori dicetuskan oleh Edward Freeman pada tahun 1984, yang ditujukan merekomendasikan pendekatan pragmatis dalam mendorong organisasi mempelajari *stakeholders*-nya supaya bisa mencapai keadaan terbaik, Freeman menerangkan keadaan terbaik ini dengan sebutan “*superior performance*”. Freeman mengemukakan tanggung jawab sosial organisasi berkaitan dengan *stakeholders*. Keuntungan yang diperoleh organisasi akan tercapai jika melaksanakan tanggung jawab sosialnya.¹

Stakeholder teori menerangkan bahwa perusahaan tidak hanya menjadi organisasi yang beroperasi untuk keperluan sendiri, melainkan wajib bisa memberikan manfaat untuk para *stakeholder*. Dukungan yang didapatkan perusahaan dari *stakeholder* tersebut sangat mempengaruhi keberadaan suatu perusahaan.² *Stakeholder* teori adalah teori yang menerangkan manajemen perusahaan mewujudkan ataupun melaksanakan harapan para *stakeholder*. Teori ini yang ditekankan adalah tentang akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan ataupun ekonomi sederhana serta mengatakan kalau organisasi lebih memilih mengungkap informasi mengenai keadaan lingkungan, sosial serta intelektual mereka secara sukarela, melampaui pengharapan yang seharusnya dalam mewujudkan harapan sebenarnya atau yang dinyatakan para

¹ Rahcmat Kriyantono, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2014), 57.

² Imam Ghozali dan Anis Chariri, *Teori Akuntansi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 25.

stakeholders.³ Dari pengertian diatas, *stakeholders* yaitu keterikatan yang dilandasi oleh kepentingan tertentu. Untuk itu, jika membahas *stakeholders theory* berarti berbicara mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan kepentingan berbagai pihak.

Berkaitan tentang teori *stakeholder*, yang pertama, *stakeholder* yaitu suatu cara yang secara terperinci berlandaskan pada pemikiran mengenai suatu organisasi beserta lingkungan, mengenai sifat yang saling berpengaruh satu sama lain yang kompleks serta dinamis. Saling berpengaruhnya *stakeholder* serta organisasi, bisa diamati dari ikatan sosial keduanya yang berupa responsibilitas serta akuntabilitas. Oleh sebab itu organisasi mempunyai akuntabilitas terhadap *stakeholder*-nya.⁴ Premis dasar dari *stakeholder* teori yaitu makin menguat ikatan korporasi, makin kuat pula bisnis korporasi dan kebalikannya. Ikatan yang kokoh dengan para *stakeholder* bersumber pada kerjasama, kepercayaan, serta rasa hormat. *Stakeholder* teori merupakan suatu rancangan manajemen strategis, bertujuan untuk mendukung korporasi menguatkan ikatan dengan para kelompok eksternal serta menumbuhkan keutamaan persaingan.⁵

Istilah *stakeholder* dari definisi Friedman, *stakeholder* ialah: "... sebagai kelompok ataupun individu yang bisa saling berpengaruh dan/ataupun dipengaruhi oleh sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu."⁶

Oleh sebab itu, di saat sumber ekonomi utama untuk perusahaan diatur oleh *stakeholder*, maka perusahaan akan menanggapi dengan menggunakan berbagai cara yang dapat memenuhi keinginan *stakeholder*.⁷ Perusahaan wajib melindungi ikatan dengan para *stakeholder* melalui mengakomodir kemauan serta kepentingan *stakeholder*-nya,

³ Ira Agustini, "Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan," *Finesta* 2(1). (2014): 43.

⁴ Marzuly Nur dan Denis Priantinah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility," *Jurnal Nominal* 1, no. 1 (2012): 24.

⁵ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 68.

⁶ R.E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholders Approach*, (Boston: Fitman, 1984): 37.

⁷ Imam Ghozali dan Anis Chariri, *Teori Akuntansi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 26.

paling utama *stakeholder* yang memiliki kekuatan terhadap tersedianya sumber daya yang dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan.⁸ Strategi yang digunakan salah satunya untuk melindungi ikatan antara para *stakeholder* perusahaan yaitu dengan melakukan perhatian pada lingkungan, dengan mengungkapkan lingkungan harapannya akan menciptakan ikatan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya sebab kemauan dari *stakeholder* dapat terakomodasi. Dampak dari ikatan yang harmonis ini perusahaan bisa menggapai keberlangsungan maupun kelestarian perusahaan (*sustainability*).

Berkaitan dengan penelitian ini, perusahaan perlu memberikan informasi tentang pertanggungjawaban sosial kepada *stakeholder*. Oleh karena itu, dibutuhkan sesuatu pengungkapan berkaitan dengan praktik *social reporting* yang dilaksanakan perusahaan. Perusahaan bisa melaksanakan pengungkapan lewat laporan perusahaan. Para *stakeholder* mempunyai hak dalam mengetahui seluruh informasi baik bersifat wajib ataupun sukarela dan informasi sosial, keuangan, serta spiritual. Akhirnya yang dilaksanakan perusahaan bukan saja bermaksud dalam memenuhi keperluan serta keinginan perusahaan itu sendiri, namun pula wajib bisa memberikan manfaat untuk *stakeholder* (teori *stakeholder*).⁹

2. *Legitimacy Theory*

Legitimasi teori bermula dari pemikiran legitimasi organisasi yang didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 yaitu suatu situasi maupun kondisi saat sistem nilai perusahaan adalah kongruen dengan sistem nilai sosial. Apabila sistem nilai perusahaan tidak sama dengan sistem nilai sosial maka ditemukan ancaman dalam memperoleh legitimasi. Dowling dan Pfeffer berpendapat bahwa legitimasi teori mengarahkan perusahaan dalam membuktikan kegiatan serta kinerjanya masyarakat bisa menerimanya. Apabila masyarakat merasakan kekecewaan dengan aktivitas

⁸ Grey, "Corporate Social And Environmental Reporting: A Review Literature And Longitudinal Study Of Uk Disclosure," *Scotland: Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 8, no. 2 (1995): 50.

⁹ Agus Purwanto, "Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Terhadap Corporate Social Responsibility," *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8, no. 1, (2011): 19.

organisasi secara sah (*legitimate*) maka masyarakat bisa mencabut kontrak sosial pada aktivitas organisasi.¹⁰ *Legitimacy theory* menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai ikatan-kontrak sosial dengan masyarakat yang mendasarkan pada nilai-nilai *justice*. Sehingga perusahaan akan memahami jika kesinambungan hidup perusahaan pula bergantung pada ikatan perusahaan dengan masyarakat serta lingkungan. Teori legitimasi bisa dimengerti dari pernyataan Dowling dan Pfeffer berikut ini :

“*Karena legitimasi adalah hal yang penting untuk organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan mencermati lingkungan*”.¹¹

Legitimasi adalah suatu hal yang sangat diperlukan pada pertumbuhan perusahaan kedepan. Perusahaan harus mendapatkan legitimasi dari semua *stakeholders* disebabkan terdapatnya batasan-batasan yang dikerjakan serta ditegaskan dari norma-norma serta nilai-nilai sosial, pandangan pada batas itu mendesak diperlukannya analisis tingkah laku organisasi dengan memperlihatkan lingkungan.¹² Anggapan umum legitimasi yang menerangkan jika yang dikerjakan entitas adalah suatu yang diinginkan, pantas, dan sesuai dengan sistem nilai, norma, serta keyakinan, ketentuan yang dibangun di dalam masyarakat. Apabila perusahaan berlaku berbenturan dengan hal-hal yang diinginkan dari sistem sosial masyarakatnya maka perusahaan bisa kehilangan legitimasinya.¹³

Legitimasi teori menunjukkan bahwa suatu perusahaan wajib mengambil langkah supaya aktivitas ataupun kinerja perusahaan tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Perihal ini dipastikan untuk terdapatnya perkembangan pemahaman serta kepedulian masyarakat. Untuk itu, teori legitimasi berkaitan pada pengungkapan sosial yang mengindikasikan argumentasi

¹⁰ Jhon Dowling and Jeffrey Pfeffer, “Organizational legitimacy: social values and organization behaviour,” *Pacific Sociological Review* 18, no. 1 (1975) : 122.

¹¹ Jhon Dowling and Jeffrey Pfeffer, “Organizational legitimacy: social values and organization behaviour,” 131.

¹² Edoardus Satya Adiwardana and Daljono, “Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan,” *Diponegoro Journal Of Accounting* 2, no. 2 (2013): 2.

¹³ Lindrianasari, *CEO Dunia, Suatu Bukti Pentingnya Informasi Akuntansi Dalam Isu Pergantian CEO*. (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 34.

kenapa perusahaan mengungkapkannya sebab mereka terletak di lingkungan masyarakat dimana mereka berkegiatan, serta gagalnya dalam mengungkapkan ini bisa berdampak merugikan bagi perusahaan.¹⁴ Menurut legitimasi teori, perusahaan melaksanakan kegiatan tertentu, termasuk perihal mengungkapkan informasi, sebab dalam upaya mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekeliling dimana perusahaan tersebut berkegiatan. Legitimasi teori merekomendasikan perusahaan dapat memastikan kalau kegiatan serta kinerjanya bisa diterima masyarakat. Perusahaan memakai laporan tahunannya dalam memperlihatkan kesan tanggung jawab lingkungan, supaya bisa diterima masyarakat.¹⁵ Apabila masyarakat merasa tidak puas dengan kegiatan ataupun aktivitas institusi secara sah (*legitimate*), masyarakat bisa mencabut kontrak sosial pada kegiatan organisasi.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan sederhananya bisa diartikan sebagai pengeluaran informasi.¹⁶ Pengungkapan (*disclosure*) yaitu informasi yang disampaikan oleh perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang keadaan perusahaan. Pengungkapan merupakan upaya yang bisa dilaksanakan perusahaan untuk menanggulangi asimetri informasi. Perihal ini terjalin sebab pengungkapan bisa menaikkan informasi yang dipunyai oleh publik sehingga bisa menghindari manajemen melaksanakan penyalahgunaan sumber daya perusahaan.¹⁷ Pengungkapan wajib harus mencantumkan seluruh informasi termasuk informasi kuantitatif (semacam bagian persediaan dalam nilai mata uang), serta bagian kualitatif (semacam tuntutan hukum), apalagi tiap-tiap

¹⁴ Umaru M. Zubairu, O. B. Sakariyau, and Chetubo Kuta Dauda., "Social Reporting Practices Of Islamic Banks In Saudi Arabia," *International Journal of Business and Social Science* 2, no. 23 (2011): 196.

¹⁵ Ni Wayan Novi Budiasni, *Corporate Sosial Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali*, (Bali: Nilacakra, 2020), 38.

¹⁶ Aldi Murdoko Sudarmadji dan Lana Sularto, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas *Voluntary Disclosure* Laporan Keuangan Tahunan," *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)* 2, ISSN: 1858-2559, (Auditorium Kampus Gunadarma 21-22 Agustus 2007) A54.

¹⁷ Paul M. Healy dan Krishna G. Palepu, "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, And The Capital Markets: A Review Of The Empirical Disclosure Literature," *Journal Of Accounting & Economics*, no. 31 (2001): 407.

peristiwa yang terjalin dengan seketika bisa mempengaruhi keadaan keuangan wajib diterangkan secara khusus dalam mendukung para pemakai laporan tahunan.¹⁸

Pengungkapan perusahaan meliputi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) serta pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).¹⁹ Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yaitu pengungkapan minimum yang diwajibkan organisasi yang berkuasa. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*), merupakan pengungkapan yang dicoba dengan sukarela oleh perusahaan tanpa diwajibkan oleh lembaga yang berwenang. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan yang satu berlainan dengan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan yang lain. Disebabkan belum terdapatnya peraturan yang mengendalikan mengenai luas pengungkapan sukarela.²⁰

Sebagai pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan, pengungkapan wajib diasumsikan dengan menaati pengungkapan minimum yang diwajibkan tersebut, sebab bila pengungkapan minimum yang wajib tersebut tidak terlaksana, perusahaan akan dituntut dalam memenuhinya hingga bisa dikatakan kalau perusahaan tidak taat terhadap pengungkapan wajib.²¹ Definisi dari pengungkapan sukarela yaitu tipe penyajian informasi keuangan perusahaan kepada publik yang diungkapkan dengan sukarela pada laporan keuangan, tanpa terdapat kewajiban yang mengaturnya. Pengungkapan sukarela yang dilaksanakan diluar pengungkapan wajib perusahaan berfungsi sebagai pelengkap informasi yang sifatnya wajib.²²

¹⁸ Suwaldiman, Motivasi Pelaporan Kinerja Sosial/Lingkungan (Triple-Bottom-Line Reporting): Sebuah Tinjauan Teoritik, *EKBISI* 8, no. 1 (2013), 67.

¹⁹ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Sleman: DEEPUBLISH, 2018), 88.

²⁰ Tri Neliana, "Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7, no. 1 (2018): 80.

²¹ Rr. Puruwita Wardani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 14, no. 1 (2011): 3.

²² Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Sleman: DEEPUBLISH, 2018), 88.

4. *Islamic Social Reporting*

Seiring dengan semakin bertumbuhnya penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada dunia usaha, keinginan melaksanakan pelaporan sosial ataupun yang bisa disebut *social reporting* juga semakin meningkat. Beberapa pendapat menerangkan tentang pengungkapan *social reporting*. *Social reporting* adalah pengembangan dari sistem pelaporan keuangan yang menggambarkan penilaian baru serta yang lebih luas dari masyarakat berhubungan dengan fungsi komunitas bisnis pada perekonomian.²³ Terdapatnya konsepsi tanggung jawab sosial yang ada dalam Islam sehingga menumbuhkan kemauan dalam mengembangkan pelaporan sosial yang berbasis syariah. Akan tetapi hingga kini belum terdapat patokan pelaporan tanggung jawab sosial berbasis syariah yang dapat menjadi tolak ukur secara internasional. Institusi yang memajukan akuntansi serta auditing untuk lembaga keuangan syariah pada tingkat keuangan syariah yaitu AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Reporting*) mengembangkan suatu patokan pelaporan, tetapi standar AAOIFI tidak bisa menjadi suatu tolak ukur atas pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah sebab unsur-unsur berkaitan pada pelaporan tanggung jawab sosial yang wajib diterangkan oleh perusahaan tidak disebutkan secara menyeluruh.²⁴ Pelaporan sosial syariah sampai sekarang sifatnya masih sukarela (*voluntary*) sebab belum terdapatnya tolak ukur dari pemerintah.²⁵ Perlu adanya ISR dalam memenuhi diungungkannya informasi tanggung jawab sosial yang belum tertera pada CSR. Sedangkan pelaporan ISR yang masih bersifat sukarela (*voluntary*) menimbulkan pelaporan tiap-tiap entitas syariah menjadi berbeda-beda.

Istilah *Islamic Social Reporting* ataupun bisa disebut ISR memakai dasar syariah sebagai landasan utamanya, dimana pemikiran ini merupakan tolak ukur pelaporan kinerja

²³ Ros Haniffa, "Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective," *Indonesian Management & Accounting Research* 1(2) (2002): 137.

²⁴ Citra Indah Merina and Verawaty, "Analisis Komparasi Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Perbankan Syariah dan Perusahaan Go Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index," *AKuisisi* 12, no. 2 (2016): 3.

²⁵ Awaliya Ma'rifatul Jannah and Asrori, "Pengaruh Gcg, Size, Jenis Produk dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan ISR," *Accounting Analysis Journal* 5, no. 1 (2016): 2.

sosial perusahaan yang ditekankan untuk sosial, keadilan, pada laporannya tidak hanya laporan terhadap karyawan, lingkungan, serta keperluan-keperluan lainnya. Pemikiran ISR ini lahir serta dikemukakan oleh Hannifa (2002) pada penelitiannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective*”.²⁶ Setelah itu dikembangkan oleh peneliti berikutnya seperti Rohanna Othman, Azlan Thani, Raditya (2009) di Malaysia serta konsep ISR sampai sekarang senantiasa masih dikembangkan.²⁷ Bagi Haniffa pelaporan sosial konvensional masih ada banyak keterbatasan, bersumber pada ketentuan syariah ia merekomendasikan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* (ISR).²⁸

Islamic Social Reporting adalah suatu patokan penerapan kinerja sosial syariah serta tanggung jawab perusahaan pada *stakeholders* yang terdiri dari sebagian para pemangku kepentingan yakni pemerintah, kompetitor, investor, karyawan, pelanggan, pemasok, serta masyarakat.²⁹ Dampak pemikiran *Corporate Responsibility* (CSR) dalam Islam menekankan manusia selaku khalifah yang harus melindungi segala ciptaan Allah SWT dalam lingkup perusahaan. Menurut kerangka Islam, seluruh *stakeholder* bisnis bertanggung jawab kepada Tuhan pada hari penghakiman atas tindakan mereka sepanjang hidup, seperti pada surat An-Nisa ayat 86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

²⁶ Ros Haniffa, “Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective,” *Indonesian Management & Accounting Research* 1(2), (2002): 129.

²⁷ Rohanna Othman, Azlan Md Thani, and Erlane K Ghani, “Determinants Of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies In Bursa Malaysia,” *Research Journal of International Studies* 12, no. 12 (2009): 4.

²⁸ Ros Haniffa, “Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective,” *Indonesian Management & Accounting Research* 1(2), (2002): 130.

²⁹ Titin Hartini, “Analisis Pengaruh Firm dan Profitabilitas terhadap Islamic Social Reporting (ISR) dengan Earning Growth Sebagai Variabel Moderating pada Jakarta Islamic Index (JII),” *Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 140.

Artinya: “Dan apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, ataupun balaslah penghormatan itu (dengan yang sepadan). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.”³⁰

Bersumber pada ayat tersebut, bisa dikatakan semua orang bertanggung jawab kepada Tuhan menyampaikan dimensi yang berbeda pada rancangan akuntabilitas diluar apa yang sudah direfleksikan pada teori-teori pelaporan sosial barat. Orang-orang muslim melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial bukan untuk imbalan finansial, melainkan murni untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Perihal tersebut meyakinkan bahwa ISR memperkuat akuntabilitas serta pemenuhan tujuan transparansi.

Pengungkapan ISR tidak hanya mengatakan ikatan antar manusia, manusia terhadap alam, melainkan pula mengatakan ikatan antara manusia dengan Tuhan pada perspektif Islam. Indeks *Islamic Social Reporting* digunakan dalam mengukur pengungkapan sosial perusahaan yang selaras dengan syariah Islam. Definisi indeks ISR yaitu suatu indeks yang menilai taraf pengungkapan sosial yang sesuai prinsip syariah yang diinformasikan perusahaan pada laporan tahunan. Indeks ISR adalah patokan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berisi himpunan unsur-unsur patokan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberlakukan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) kemudian para peneliti dikembangkan lagi tentang *item-item* CSR yang diungkapkan oleh suatu institusi Islam. Kesesuaian indeks ISR untuk institusi Islam dikarenakan diungkapkannya berbagai hal yang kaitannya dengan prinsip Islam terdiri dari transaksi yang bebas unsur riba, spekulatif serta *gharar*, dan zakat, status patuh syariah serta dimensi sosial seperti *qordul hasan*, *sodaqoh*, serta *waqof*, hingga dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.³¹ Indeks ISR yang dipakai pada penelitian ini yang merujuk pada penelitian

³⁰ Al-Quran, An-Nisa ayat 86, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 125.

³¹ Citra Indah Merina and Verawati, “Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Go Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index,” *Jurnal Ilmiah MBiA* 15, no. 1 (2016): 71.

sebelumnya yakni penelitian Othman, *et.al* (2009). Berikut pengungkapan ISR yang disusun berdasarkan 6 indikator yang kemungkinan berpengaruh pada pengungkapan ISR saat sekarang.

a. Pendanaan dan Investasi

Item yang tercantum pada indikator pendanaan serta investasi ialah tentang asal muasal dana dalam kegiatan investasi serta pembiayaan yang bebas dari faktor riba, gharar, serta kesepakatan yang diharamkan oleh Islam. Item pengungkapan ISR investasi serta keuangan terdiri dari kegiatan gharar, riba, zakat, keterlambatan pembayaran oleh *insolvent clients*, *curent value balance sheet*, dan *value added statement*.

b. Produk dan Jasa

Item tentang produk serta jasa. Unsur-unsur pada indikator ini pengungkapan pada halal status ataupun produk berbasis syariah, produk yang ramah lingkungan, keamanan dan kualitas produk, keluhan pelanggan ataupun peristiwa yang terjadi sebab tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku.

c. Karyawan

Unsur-unsur indikator karyawan senantiasa ditekankan pada kaidah-kaidah Islam meliputi ciri pekerjaan, pelatihan serta pendidikan keterlibatan karyawan, kesempatan yang sama, keselamatan kerja serta kesehatan, lingkungan pekerjaan serta penerimaan khusus, erselon yang lebih tinggi melaksanakan ibadah bersama dengan manajer tingkat bawah serta menengah, karyawan muslim diizinkan shalat wajib serta puasa ramadhan, dan tempat ibadah yang layak.

d. Masyarakat

Indikator ini paling erat kaitannya dengan pemikiran tanggungjawab sosial. Unsur-unsunya kebanyakan berfokus pada pengungkapan kaitannya pada prinsip-prinsip syariat Islam meliputi shodaqah/donasi, *waqaf*, *qardhul hasan*, zakat karyawan ataupun nasabah, pendidikan, lulusan kerja, pemberdayaan ekonomi, perhatian terhadap anak-anak, bantuan kesehatan, pengembangan transformasi masjid, aktivitas kepemudaan, sponsor acara kegiatan, serta kegiatan sosial yang lain.

e. Lingkungan

Unsur-unsur lingkungan erat kaitannya dengan pengungkapan pada kegiatan serta banyaknya dana yang belanjakan perusahaan dalam kegiatan lingkungannya seperti aksi peduli lingkungan, kelestarian pada flora serta fauna, pencemaran, konservasi lingkungan, rekontruksi serta pengerjaan sarana umum, kebijakan manajemen lingkungan serta audit lingkungan.³²

f. Tata Kelola Perusahaan

Item pengungkapan terkait tata kelola perusahaan ialah profil serta strategi organisasi, komposisi organisasi, implementasi peran serta tanggungjawab dewan komisaris dan direksi, implementasi serta kelengkapan fungsi komite, implementasi peran serta tanggungjawab dewan pengawas syariah, etika perusahaan, dan kebijakan anti-korupsi.³³

5. Kerangka Syariah ISR

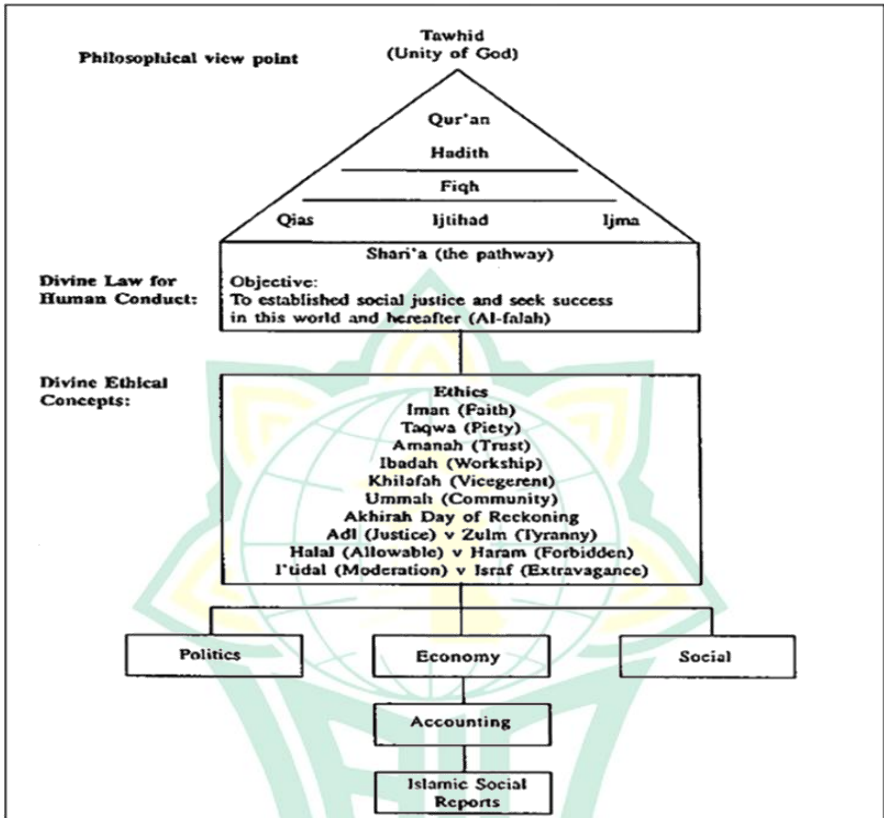
Berikut ini kerangka konseptual ISR yang dikemukakan oleh Haniffa. Bagi Haniffa pelaporan sosial konvensional masih ada banyak keterbatasan, bersumber pada ketentuan syariah ia mengemukakan kerangka konseptual ISR.³⁴

³² Ros Haniffa, "Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective," *Indonesian Management & Accounting Research* 1(2) (2002): 137.

³³ Rohanna Othman, Azlan Md Thani, and Erlane K Ghani, "Determinants Of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies In Bursa Malaysia," *Research Journal of International Studies* 12, no. 12 (2009): 19-20.

³⁴ Ros Haniffa, "Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective," *Indonesian Management & Accounting Research* 1(2), (2002) 128.

Gambar 2.1 Kerangka ISR



Sumber: Hanifa (2002)

Bersumber pada gambar diatas, bisa diketahui tauhid adalah dasar utama ajaran Islam. Tauhid mempunyai arti percaya Allah SWT ialah esa serta tidak terdapat sekutu bagi-Nya pada *rububiyah* (ketuhanan), *uluhiyah* (ibadah), asma' serta sifat-Nya. Perihal ini memiliki makna Allah SWT merupakan pemilik jagat raya seisinya. Oleh sebab itu, manusia wajib melindungi, memelihara, serta merawat jagat raya tanpa terkecuali. Berikutnya, peraturan yang lahir dari tauhid diperlukan manusia untuk menjalani kehidupan tiap hari ialah pedoman syariah. Dasar-dasar syariah bermula pada

tiga sumber utama yaitu Al-Qur'an, hadits, fiqh, kemudian sumber-sumber lain semacam qiyas, ijtihad, dan ijma'.³⁵

Merujuk ilustrasi diatas bisa disimpulkan kalau dalam dasar-dasar syariah memuat mengenai pedoman serta berkaitan pada kehidupan manusia kesehariannya yang bukan hanya berisi mengenai pemikiran etika dalam perspektif Islam, misal aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan tiap hari yaitu ekonomi, sosial serta politik. ISR berada pada cakupan dimensi ekonomi yakni terletak dalam dimensi akuntansi, hingga kesimpulannya ISR ialah suatu rancangan laporan dari pertanggungjawaban sosial selaras dengan pedoman syariah. *Islamic Social Reporting* Hanifa memiliki tujuan yakni wujud pertanggungjawaban pada masyarakat, kemudian yang utama yaitu akuntabilitas kepada Allah SWT, metode yang wajib dilalui adalah dengan memberi informasi secara transparan, sesuai keperluan pelaksana keputusan muslim dan relevan.³⁶

6. Faktor-Faktor Fundamental

Faktor fundamental merupakan faktor yang kaitannya dengan kinerja suatu organisasi. Faktor fundamental mengutamakan pada rasio keuangan serta peristiwa yang terjadi langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap performa keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik bisa menciptakan tingkat pengembalian baik yang diinginkan ketimbang berinvestasi pada perusahaan yang kinerjanya kurang baik.³⁷ Indikator yang dipakai pada penelitian ini yaitu rasio profitabilitas dan rasio likuiditas.

Profitabilitas atau laba didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Konsep jual beli dan perolehan laba Islami, memberikan tuntunan pada manusia dalam

³⁵ Latief Mahmud dan Karimullah, *Ilmu Tauhid*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 28-31.

³⁶ Ros Haniffa, "Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective," *Indonesian Management & Accounting Research* 1(2), 2002, 136.

³⁷ Elga Yulia Pangabean dan Mathius Tandiontong, "Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015," *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* 17, no. 1 (2017): 68.

perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat pemuas dengan jalan yang baik dan alat pemuas yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara perolehannya. Prinsip keridhoan, ta'awun, kemudahan, dan transparansi, dalam jual beli Islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan dan serta mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah.³⁸

Al Imam Zamakhsari mendefinisikan keuntungan yaitu sebagai kelebihan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan.³⁹ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رِيحَتْ
 تَجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya “mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”⁴⁰

Imam Al-Qurthubi dalam *al-Jami' li al Ahkami al-Quran* menafsirkan fiman Allah “Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”, mengatakan bahwa Allah mendasarkan pengertian laba dagang itu kepada kebiasaan orang Arab seperti pada ucapan mereka, “beruntung daganganmu”, atau “merugi transaksimu”. Kedua ungkapan ini berarti “kamu beruntung dan merugi dalam jual beli kamu”⁴¹

³⁸ Fachri Fachrudin, “Filosofi Laba Dalam perspektif Fiqh Mu’amalah dan Ekonomi Konvensional,” *Al Mashlahah jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2008 : 281.

³⁹ Abu Qosim Mahmud ibn Muhammadaz Zamakhsyari, *Tafsir al Kasyaf*, Dar al Kutub Ilmiah 1424H , Beirut, 77.

⁴⁰ Alquran, Al-Baqarah ayat 16, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 30.

⁴¹ Abu abdullah bin ahmad bin abi bakr bin farh al anshari al khajraji samsuddin al qurthubi, “ *Jami’ Li Al Ahkamil Al Qur’an*”, Dar alimul al kutub, Saudi Arabia, 2003.

Hal ini disebabkan karena memang tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan. Jika orang-orang yang beriman telah mendo'akan buruk baginya yaitu agar Allah menjadikan jual belinya tidak mendatangkan keuntungan, maka maksud dan tujuan dari jual beli itu akan sirna dan kelelahannya hanya akan terbuang sia-sia. Untuk itu perusahaan dalam memperoleh profit atau laba yang banyak diperbolehkan asalkan tidak merugikan pihak manapun.

Selanjutnya, Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong), dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang dalam bahasa arab merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungjawab orang lain.⁴² Utang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari.⁴³ Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

⁴² Nurul Huda, Achmad Aliyadin, dan Agus Suprayogi, *Keungan Publik Islami : pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 239.

⁴³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 152.

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁴⁴

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Niat tolong-menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Allah telah memberikan peringatan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۡءًا ۚ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لِیُّهُۥ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau

⁴⁴ Al-Quran, Al-Maidah ayat 2, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 200.

tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.⁴⁵

Ayat ini menjelaskan, bahwa dalam bertransaksi yang dilaksanakan idealnya harus tercatat agar ada pegangan diantara pihak yang bertransaksi sebagai bukti etintik. Pada era sekarang ini, sering terjadi permasalahan dikarenakan tidak ada bukti tertulis, sehingga pihak yang bertransaksi saling menyangkal, hal ini memungkinkan karena memiliki nilai yang menguntungkan pada salah satu pihak sehingga ada pihak yang dirugikan. Perbuatan yang cukup sulit adalah ketika seseorang harus membayar utangnya, sering terjadi perselisihan diantara pihak dikarenakan salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan awal. Padahal membayar utang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini tergambar pada hadist Nabi sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari Abdullah bin Ka'b bin Malik dari Ka'b, bahwa ia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrad di dalam Masjid hingga suara keduanya meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah SAW, yang berada di rumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gorden kamarnya, beliau bersabda: Wahai Ka'b!” Ka'b bin Malik menjawab: Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Beliau bersabda: Bebaskanlah hutangmu ini. Beliau lalu memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Ka'b bin Malik menjawab, sudah aku lakukan wahai Rasulullah.” Beliau lalu bersabda (kepada Ibnu Abu Hadrad): Sekarang bayarlah”⁴⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa suatu kebajikan apabila melunasi utang dengan sesegera mungkin tanpa harus di tagih-tagih oleh pemberi utang, namun tidak jarang kita jumpai di tengah masyarakat kita, banyak orang yang berutang, mereka enggan membayarkannya ketika waktu pelunasan sudah jatuh tempo. Kewajiban segera membayar utang, termasuk utang seseorang yang meninggal dunia, hal ini dilakukan

⁴⁵ Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 2.

⁴⁶ Imam Abu Husaini Muslim bin Al-Hajaz An-Naisaburi, *al-Jami' as-Shahih*. Juz 5:30.

belum boleh dikuburkan sebelum selesai utang atau adanya pengakuan utang dari keluarga yang ditinggalkan. Dalam perspektif Islam berhutang merupakan kenyataan yang melanda hampir seluruh perusahaan baik utang jangka pendek maupun jangka panjang, menurut pandangan Islam apabila perusahaan mempunyai utang akan lebih baik untuk menyegerakan untuk melunasi utangnya.

a. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menggambarkan betapa besarnya laba perusahaan dari pemanfaatan sumber daya yang ada, tujuannya untuk mengetahui kapabilitas perusahaan dari laba yang dihasilkan semasa kurun waktu tertentu serta memperlihatkan keterangan tentang keefektifan manajemen dalam menjalankan aktivitas operasinya. Profitabilitas adalah faktor yang semestinya mendapatkan perhatian penting sebab dalam keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus berada dalam posisi yang menguntungkan.⁴⁷ Pada penelitian ini indikator profitabilitas yang dipakai adalah ROE (*Return On Equity*), disebabkan dapat menggambarkan pengelolaan modal perusahaan sendiri dengan efektif, menilai taraf profit yang berasal dari investasi yang telah dilaksanakan pemilik modal serta pemegang saham perusahaan. Harapannya investor bisa tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan yang mempunyai taraf profitabilitas tinggi sehingga berdampak dengan pengungkapan sosial perusahaan yang lebih luas juga.⁴⁸

b. Rasio Likuiditas

Likuiditas yaitu suatu keadaan yang menggambarkan kapabilitas perusahaan dalam pemenuhan beban jangka pendeknya serta bisa mendanai operasional perusahaan. Rasio ini digunakan sebagai pemaparan tentang pengaruh kesiapan dana untuk pengembangan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan *current rasio* untuk mengukur kapabilitas aktiva lancar perusahaan yang dipakai dalam

⁴⁷ Aldina Sepitiana, *Analisis Laporan Keuangan: Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 108-109.

⁴⁸ Yuni Armayanti, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia," (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), 45.

pelunasan pinjaman (kewajiban) lancar yang akan jatuh waktu.⁴⁹

7. Mekanisme *Corporate Governance*

Definisi dari mekanisme *corporate governance* yaitu suatu metode untuk mengawasi serta mengelola prosedur pengawasan usaha yang dijalankan secara berkelanjutan dalam meningkatkan nilai saham, alhasil akan menaikkan nilai perusahaan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pada *stakeholders* tanpa mengabaikan keperluan *stakeholders* yang terdiri dari masyarakat, kreditur dan karyawan.⁵⁰ Indikator yang dipakai dalam mekanisme *corporate governance* yakni ukuran dewan komisaris serta komite audit. *Corporate governance* dalam perspektif Islam, senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkah-laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental dan imanen. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi keimanan seorang muslim kepada Allah Swt. Maka dari sini kita mengenal nilai tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikiran serta perilaku seorang muslim, termasuk dalam memahami *corporate governance*. Salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai tauhid adalah prinsip keadilan. Al-Quran senantiasa mendorong umatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ

⁴⁹ Arief Sugiono dan Edi Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Jakarta: Grasindo, 2008) 59-61.

⁵⁰ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018) 10.

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵¹

Maksud dari ayat diatas adalah, jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah Swt., bukan karena manusia atau mencari popularitas dan jadilah saksi dengan adil. Maksudnya secara adil dan bukan secara curang. Sejalan dengan ayat tersebut, salah satu prinsip dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah *fairness* (kesetaraan atau keadilan) yang dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak. Jika dikaitkan dengan syariah, maka keadilan tersebut harus mencakup aspek spiritual dan material. Maka makna adil dapat diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam *corporate governance* maupun nilai-nilai lain yang dapat dimunculkan atas implementasi keadilan.

a. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah suatu sistem untuk mengendalikan serta memberi petunjuk dan pengarahan untuk direksi. Direksi bertanggungjawab untuk menaikkan efisiensi serta daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris adalah kekuatan sentral dan keberhasilan perusahaan.⁵² Tugas yang dijalankan dewan komisaris salah satunya menyampaikan laporan tentang

⁵¹ Al-Quran, An-Nisa ayat 86, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 150.

⁵² Bonafasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan & Risiko menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham* (Jakarta: Visimedia, 2016), 65.

pengoperasian tugas pengendalian serta memberi arahan yang dilaksanakan pada laporan tahunan dan mempelajari serta menyepakati laporan tahunan tersebut. Selaku pihak independen serta netral pada perusahaan harapannya dewan komisaris sanggup menghubungkan adanya asimetri informasi yang terjalin diantara pihak pemilik dengan pihak manajer dengan mendesak dewan komisaris lain untuk melaksanakan fungsi pengendalian yang lebih baik.⁵³ Variabel ukuran dewan komisaris pada penelitian ini diukur menggunakan jumlah dewan komisaris pada laporan tahunan perusahaan.

b. Komite Audit

Pengertian dari komite audit adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yakni badan yang peranannya terletak dibawah dewan komisaris serta bertanggung jawab secara langsung terhadap dewan komisaris.⁵⁴ Tugas komite audit salah satunya adalah bisa memastikan struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan kualitas pengendalian internal serta kualitas pengungkapan informasi perusahaan di harapkan bisa meningkat. Tugas komite audit tidak hanya melaksanakan pengawasan kinerja manajemen tetapi berperan penting sebagai penghubung antara pemegang saham dengan dewan komisaris dalam menghindari permasalahan pengendalian internal perusahaan. Pembentukan komite audit oleh suatu perusahaan berperan dalam memberikan pemikiran tentang permasalahan yang berfungsi dengan kebijakan keuangan, akuntansi serta pengendalian intern.⁵⁵ Pengukuran variabel pada penelitian ini dapat dilihat dari jumlah anggota komite audit pada laporan tahunan perusahaan.

⁵³ Khaerun Nissa Rizfani and Deni Lubis, "Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perusahaan di Jakarta Islamic Index," *Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2019): 107.

⁵⁴ Dewi Rachmania and Nurul Alviana, "Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Islamic Social Reporting (ISR)," *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 1 (2018): 52.

⁵⁵ Erika Maudhy Sajekti and Maswar Patuh Priyadi, "Pengaruh Faktor Fundamental dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no. 4 (2019): 5.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa riset sebelumnya terkait dengan *Islamic Social Reporting*

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Periset dan Tahun Penelitian	Tema	Hasil penelitian
1.	Rizky Guntarto dan Isnantyo Arief Nugroho, <i>Jurnal Ekonomi Islam</i> Vol. 11, No. 2, November 2020	Pengaruh Likuiditas serta <i>Leverage</i> terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi (studi kasus pada bank syariah tahun 2015-2018)	Mendapatkan hasil variabel likuiditas, profitabilitas, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .
2.	Mike Sonita Sari dan Nayang Helmayunita, <i>Jurnal Eksplorasi Akuntansi</i> Vol. 1, No. 2 Seri C, Mei 2019	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (Studi Empiris para Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017)	Penelitian ini hasilnya secara simultan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik ukuran komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, serta ukuran komite audit, berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Secara

			<p>parsial ukuran komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial kepemilikan publik serta dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.</p>
<p>3.</p>	<p>Hendri Afandi dan Meta Nursita <i>Majalah Ilmiah BIJAK</i> vol. 16, no. 1, (Maret), 2019</p>	<p><i>Profitabilitas, Liquiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Sebuah Analisis ISR Pada Perusahaan Yang Terdaftar di JII</i></p>	<p><i>Profitabilitas</i> dan <i>liquiditas</i> mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan <i>ISR</i> pada perusahaan <i>JII</i>, sementara itu ukuran perusahaan serta <i>leverage</i> tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengungkapan <i>ISR</i> dan secara bersama empat variabel tersebut dihitung dengan statistika akan</p>

			memiliki pengaruh yang positif signifikan.
4.	Yunita Prameswari, Agustina Maya Saraswati dan Sinta Permata Sari, <i>Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper 2019</i>	<i>Good Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada perusahaan yang Terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index (JII)</i>	Penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa bursa syariah di Indonesia masih berorientasi pada pengungkapan informasi keuangan dibandingkan tanggung jawab sosial.
5.	Renny Agustin Permatasari dan Rina Trisnawati, <i>Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper 2019</i>	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia tahun 2015-2018)	Faktor ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, serta dewan komisaris tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> . Sedangkan hanya umur perusahaan tersebut memiliki pengaruh pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .
6.	Dewi Rachmania dan Nurul Alviana <i>Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i> Vol. 4, No. 1 2018	Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme <i>Good Corporate</i>	Variabel profitabilitas serta dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

		<i>Governance terhadap Islamic Social Reporting (ISR)</i>	ISR pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2014-2018, sedangkan variabel komite audit dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
7.	Mahardika Kurniawati dan Rizal Yaya, <i>Jurnal Akuntansi dan Investasi</i> , Vol. 18 No. 2 Hlm: 163-171 Juli 2017	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>	Profitabilitas, kinerja lingkungan dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan <i>ISR</i> perusahaan yang terdaftar pada DES. Sedangkan komite audit serta independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>ISR</i> perusahaan yang terdaftar pada DES.
8.	Nindiya Tyas Hasanah, Novi Wulandari dan Widiyanti, Sudarno, <i>e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi</i>	Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social</i>	Hasilnya ukuran komite audit, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan

	Vol. V, No. 2 2017	Reporting (ISR)	<i>ISR</i> , <i>leverage</i> serta dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>ISR</i> .
--	--------------------	-----------------	---

Sumber : Hasil Pemetaan Peneliti

Beberapa riset terdahulu untuk menunjukkan pengungkapan *ISR* telah memperlihatkan akuntabilitas yang baik, namun dalam pengungkapan yang kaitannya dengan *ISR* dapat dibilang belum sepenuhnya optimal. Riset Nindya Tyas Hasanah dkk (2017) yang meneliti tentang *ISR* di perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode tahun 2011-2015 menunjukkan hasil yaitu profitabilitas, komite audit, dan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*, sementara itu variabel *leverage* dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*. Riset serupa juga pernah dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017) yang mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (*ISR*). Hasilnya menunjukkan perusahaan melaksanakan pengungkapan *ISR* dipengaruhi oleh faktor seperti ukuran dewan komisaris dan profitabilitas yang bisa dijadikan dasar penilaian untuk perusahaan dalam melaksanakan pengungkapan *ISR* yang layak serta sesuai prinsip syariah. Taraf pengungkapan *ISR* bisa nilainya tinggi apabila perusahaan tersebut mempunyai dewan komisaris yang banyak, mempunyai taraf profitabilitas yang tinggi serta perusahaan dapat memperbaiki kinerja komite audit agar dapat melakukan peran serta fungsinya secara efektif dan objektif sehingga kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bisa ditingkatkan.

Selanjutnya, riset Rachmania dan Alviana (2018) yang meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan dan mekanisme *good corporate governance* terhadap *Islamic Social Reporting* (*ISR*) menunjukkan hasil variabel profitabilitas dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*, sementara variabel *leverage* dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*. Riset Sari serta Helmayunita (2019) yang berjudul pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (studi empiris pada

perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2013-2017) menunjukkan ukuran komisaris independen serta komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Riset serupa oleh Yunita dkk (2019) yang berjudul *good corporate governance* dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) yang menghasilkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan manajerial mempengaruhi pengungkapan ISR, sementara kepemilikan institusional serta komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil riset ini menunjukkan bahwa bursa syariah di Indonesia masih beorientasi pada pengungkapan informasi keuangan dibandingkan tanggung jawab sosial yang hal ini tidak terlepas dari fokus informasi investor yang cenderung menggunakan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Riset Affandi dan Nursita (2019), kaitannya dengan pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap perusahaan yang terdaftar di JII, profitabilitas dan likuiditas menunjukkan hubungan berpengaruh secara positif. Riset lainnya juga dilakukan Guntarto dan Nugroho yang meneliti tentang pengaruh *leverage* dan likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi (studi kasus pada bank syariah tahun 2015-2018). Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, serta *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

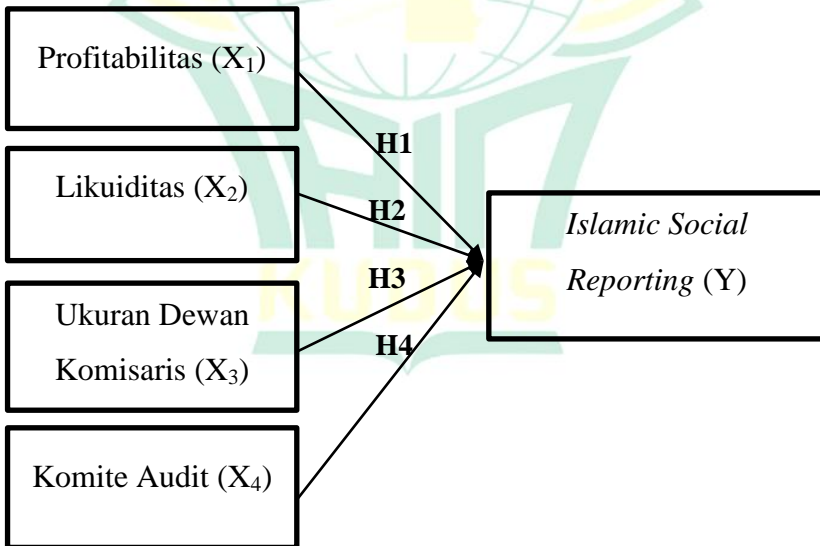
Beberapa riset terdahulu memperlihatkan hasil yang berbeda-beda dan cenderung tidak konsisten, sehingga dalam penelitian ini peneliti kembali mengkaji dan meneliti beberapa aspek yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan variabel independen yakni profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan komisaris serta komite audit pada objek penelitian indeks JII terbaru yaitu JII 70 tahun 2019, adanya penelitian ini akan menggambarkan situasi lebih terkini. Perusahaan yang terdaftar di JII 70 sudah bisa dipastikan memiliki kegiatan operasional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga besar kemungkinan banyak investor muslim maupun pihak berkepentingan lainnya yang berinvestasi dan terkait dengan perusahaan tersebut. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perusahaan yang terdaftar di JII 70 yang memiliki pengungkapan ISR yang tinggi mengindikasikan perusahaan telah melakukan dan mengelola

perusahaan dengan memadai dan sesuai prinsip syariah, sehingga masyarakat atau *stakeholders* muslim bisa terdorong untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan ISR yang tinggi.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan bagian riset yang menggambarkan rangkaian pikiran dari peneliti yang dipaparkan dalam hipotesis. Tujuan kerangka berfikir yaitu digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diformulasikan secara teoritis yang perlu diuji kebenarannya. Teori dalam landasan teori bisa dijadikan sumber dalam menyusun kerangka pemikiran. Perihal ini penyusunan kerangka pemikiran tidak terlepas dari landasan teori.⁵⁶ Berdasarkan landasan teori diatas serta penelitian sebelumnya, kerangka kopsseptual yang ada pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



⁵⁶ Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang: UB Press, 2012), 24-25.

D. Hipotesis

1. Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Profitabilitas sangat diperlukan untuk seluruh perusahaan karena makin tingginya taraf profitabilitas membuktikan makin tingginya taraf laba atau profit yang dicapai perusahaan. Ketika perusahaan tersebut dimiliki pemegang saham (investor), dengan itu investor pastinya menginginkan memperoleh penerimaan modal yang maksimal dari yang sudah diinvestasikan, untuk itu profitabilitas perusahaan harus ditingkatkan.⁵⁷ Profitabilitas perusahaan identik dengan kinerja ekonominya, kinerja ekonomi perusahaan yang kuat bisa meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi merupakan salah satu upaya dalam menarik investor, taraf profitabilitas perusahaan yang besar berimbas pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dilaksanakan perusahaan.⁵⁸ Penelitian Kurniawati dan Yaya (2017) membuktikan adanya hubungan yang positif antara profitabilitas dengan tingkat pengungkapan ISR. Penelitian ini menyatakan perusahaan yang mempunyai taraf profit yang tinggi bisa memikat para investor dengan cara memberi informasi yang lebih baik pada masyarakat serta *stakeholders* lain yakni dengan menumbuhkan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut mengindikasikan tingginya taraf profitabilitas maka pengungkapan ISR akan semakin luas.⁵⁹ Sementara penelitian Othman et al., (2009) hasilnya menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Report* pada *annual reports*.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan serta data empiris riset-riset sebelumnya yang telah diuraikan maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁵⁷ Sri Rahayu, "Profitabilitas dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index," *Jurnal Mutiara Akuntansi* 4, no. 1 (2019), 37.

⁵⁸ Nindya Tyas H, Novi Wulandari W dan Sudarno, "Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)," *e-Journal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 2, (2018): 116.

⁵⁹ Mahardhika Kurniawati and Rizal Yaya, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting," *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 18, no. 2 (2017): 169.

⁶⁰ Rohana Othman, Azlan Md. Thani, dan Erlane K Ghani, "Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia," *Research Journal of International Studies* 12, no. 12 (2009): 15.

H_1 : Rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)

2. Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Pengertian likuiditas yaitu salah satu indikator mengenai kapabilitas perusahaan membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya saat jatuh waktu dengan memakai aktiva lancar yang ada. Pengukuran likuiditas menggunakan *current ratio* yang memperlihatkan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar serta suatu dimensi yang sangat umum dipakai dalam mengenali kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.⁶¹ Menurut Badjuri, likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, dimana keadaan perusahaan didasarkan bahwa baiknya likuiditas yang dimiliki perusahaan, menunjukkan struktur keuangan yang baik pula.⁶² Riset Affandi dan Nursita (2019) menunjukkan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR didalam suatu perusahaan, dimana rasio likuiditas semakin luas taraf pengungkapan informasinya apabila di sisi kesehatan rasio likuiditas perusahaan semakin tinggi ataupun akan menggambarkan adanya kapabilitas perusahaan dalam menumbuhkan pengungkapan sosialnya yakni pengungkapan ISR.⁶³ Riset ini hasilnya sesuai dengan riset yang dilaksanakan oleh Maulina dan Iqramuddin (2019) yang melaporkan likuiditas mempengaruhi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.⁶⁴

Berdasarkan pemaparan serta data empiris riset-riset sebelumnya yang telah diuraikan maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁶¹ Nur Aini et al., "Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, Profitabilitas dan Kinerja Lingkungan Hidup terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting," *Issn : 1979-4878* 6, no. 1 (2017): 71.

⁶² Achmad Badjuri, Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia," *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan* 3, no.1, (2011), 42.

⁶³ Hendri Affandi and Meta Nursita, "Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan: Sebuah Analisis Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Terdaftar di JII," *Majalah Ilmiah Bijak* 16, no. 1 (2019): 7.

⁶⁴ Rina Maulina and Iqramuddin, "Pengaruh Likuiditas, Financial Leverage, Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dan Dampaknya terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal AKBIS* 3, no. 1 (2019): 65.

H₂ : Rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)

3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Pengertian dewan komisaris yaitu suatu sistem yang memberikan petunjuk dan mengawasi serta mengarahkan pada pengelolaan perusahaan maupun pihak manajemen. Manajemen perihal ini bertanggung jawab dalam menumbuhkan kemampuan dan daya saing perusahaan, serta dewan komisaris bertanggung jawab dalam mengamati manajemen.⁶⁵ Komponen utama pada mekanisme *corporate governance* adalah dewan komisaris. Terdapatnya dewan komisaris pada perusahaan harapannya bisa dapat mendesak terwujudnya sistem pengendalian yang baik untuk manajemen perusahaan. Besarnya dewan komisaris yang ada disuatu perusahaan, pengawasan dalam perusahaan menjadi lebih baik. Adanya pengawasan yang baik, bisa harapannya pengungkapan ISR akan menjadi lebih luas.⁶⁶ Sehingga, banyaknya dewan komisaris yang ada pada perusahaan, maka akan menjadi lebih mudah dalam mengatur manajemen puncak (CEO) serta monitoring yang dilaksanakan lebih efisien. Apabila berhubungan pada pengungkapan tanggung jawab sosial, tekanan yang ada pada manajemen pula untuk mengungkapkannya akan lebih besar.⁶⁷ Adanya pemantauan yang meningkat diharapkan pengungkapan informasi ISR bisa lebih luas sebab meminimalisir kesempatan informasi yang ditutupi. Sejalan dengan riset Khoiruddin (2013) memaparkan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.⁶⁸

⁶⁵ Achmad Badjuri, "Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia," *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan* 3, no.1, (2011), 43.

⁶⁶ Mahardhika Kurniawati and Rizal Yaya, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting," *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 18, no. 2 (2017): 165.

⁶⁷ Awalya Ma'rifatul Jannah and Asrori, "Pengaruh Gcg, Size, Jenis Produk dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan ISR," *Accounting Analysis Journal* 5, no. 1 (2016): 2.

⁶⁸ Amirul Koirudin, "Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Accounting Analysis Journal* 2, no. 2 (2013): 230.

Berdasarkan pemaparan serta data empiris riset-riset sebelumnya yang telah diuraikan maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* perusahaan.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Definisi komite audit yaitu instrumen kelengkapan perusahaan yang mempunyai tanggung jawab kepada dewan komisaris. Tugas komite audit untuk meyakinkan pelaksanaan yang baik dari struktur pengendalian internal perusahaan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh komite audit pada perusahaan di harapkan bisa memajukan mutu pengendalian internal serta mutu pengungkapan informasi perusahaan. Tugas komite audit tidak hanya melaksanakan pemantauan kinerja manajemen pula sangat diperlukan sebagai perantara pemegang saham dengan dewan komisaris untuk menghindari permasalahan pengendalian internal perusahaan.⁶⁹ Banyaknya jumlah komite audit yang dipunyai oleh perusahaan maka pihak manajemen perusahaan dapat mempunyai tekanan yang lebih besar dalam mengungkapkan *Islamic Social Reporting* pada laporan tahunan perusahaan. Komite audit yang bertanggungjawab membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas serta manajemen resiko, bertanggungjawab atas laporan keuangan serta laporan tahunan, melaksanakan tata kelola perusahaan, serta hal-hal lain yang menjadi atensi dewan komisaris diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemilik. Kehadiran komite audit konflik kepentingan yang terjalin antara pihak manajemen serta pemilik (pemegang saham) akan berkurang. Emiten syariah ditetapkan bersumber pada prinsip- prinsip Islam serta diharapkan aktivitas perusahaan akan selaras dengan hukum serta kerangka Islam, sehingga *ISR* pula sepatutnya diungkapkan di dalam laporan tahunan emiten syariah. Kontrol yang efisien dari komite audit harapannya akan meningkatkan sistem pengendalian internal serta mutu pengungkapan informasi perusahaan. Semakin besar dimensi komite audit dalam perusahaan akan menjadi efisien dalam pengawasan yang dilaksanakan terhadap manajemen sehingga

⁶⁹ Erika Maudhy Sajekti and Maswar Patuh Priyadi, "Pengaruh Faktor Fundamental dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no. 4 (2019): 5.

mempengaruhi luas pengungkapan ISR di dalam laporan tahunan perusahaan.⁷⁰ Riset Rachmania dan Alviana (2018) menunjukkan hasil komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).⁷¹ Serupa dengan riset Hasanah dkk (2017) menunjukkan banyaknya anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pihak manajemen perusahaan akan mempunyai tekanan yang besar dalam mengungkapkan *Islamic Social Reporting* didalam laporan tahunan perusahaan.⁷²

Berdasarkan pemaparan serta data empiris riset-riset sebelumnya yang telah diuraikan maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4 : Komite audit berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) perusahaan.



⁷⁰ Mike Sonita Sari and Nayang Helmayunita, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 758.

⁷¹ Dewi Rachmania and Nurul Alviana, “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Islamic Social Reporting (ISR),” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 1 (2018): 54.

⁷² Nindya Tyas Hasanah, Novi Wulandari Widiyanti, and S. Sudarno, “Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR),” *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 118.